



Media: Republika

Hari: Kamis

Tanggal: 23 Februari 2017

Halaman: 13

Rekapitulasi Surat Suara Didemo Massa PDIP

YULIANINGSIH, RIZMA RIYANDI

Massa menuntut agar KPU membuka kotak suara tidak sah.

YOGYAKARTA — Rekapitulasi surat suara secara manual hari pertama di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta diwarnai demonstrasi ratusan kader PDIP DIY. Massa yang hadir sejak pukul 09.00 WIB memenuhi jalan di depan gerbang kantor KPU Yogyakarta.

Gerbang kantor KPU dijaga puluhan aparat kepolisian. Massa PDIP tersebut juga hadir dari kabupaten lain di DIY baik dari Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo, dan Bantul. Wakil Ketua DPD PDIP DIY, Yuni Satya Rahayu hadir memimpin massa aksi.

"Kami ke sini mengawal proses rekapitulasi. Sampai tuntutan kami dipenuhi kami akan di sini. Kalau tidak (dipenuhi-red) kami akan bawa ke pusat," ujar Yuni di sela-sela aksi.

Menurutnya, tuntutan pihaknya jelas, yaitu agar KPU Kota Yogyakarta membuka kotak suara tidak sah dalam proses rekapitulasi surat di KPU. Hingga berita ini ditulis, proses

rekapitulasi surat di KPU Kota Yogyakarta baru dimulai satu kecamatan yaitu Mantrijeron.

Di dalam kantor KPU, Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto, memimpin proses rekapitulasi surat suara secara manual. Proses penghitungan surat suara manual diwarnai protes dari tim Badan Pemantauan Pemilu (Bapil) DPC PDIP Kota Yogyakarta serta beberapa saksi pasangan calon nomor 1, Imam Priyono-Achmad Fadli, dari Kecamatan Mantrijeron, Kotagede, dan Keraton.

Ketua Bapil DPC PDIP Kota Yogyakarta, Foky Ardiyanto mempermasalahkan tidak adanya bukti tanda terima penyerahan C1 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke pemilih secara langsung. Pihaknya mengindikasikan banyak C1 yang tidak sampai langsung ke pemilih. "Kami mendapatkan laporan ada banyak C1 yang hanya dititipkan, maka dari itu kami menanyakan bukti penerimaannya," ujarnya.

Wawan membenarkan pihaknya tidak memiliki rekam serah terima C1 dari PPS ke pemilih yang masuk daftar pemilih tetap (DPT). Itu dilakukan karena memang aturan tidak mengharuskan.

KPU Kota Yogyakarta memiliki waktu hingga Jumat (24/2) untuk melakukan rekapitulasi. Setelah

direkapitulasi, KPU Kota Yogyakarta akan mengumumkan secara resmi jumlah suara yang diperoleh setiap pasangan calon kepala daerah. Sedangkan untuk penetapan calon terpilih baru akan dilakukan Maret jika tidak ada gugatan.

Isu SARA

Sementara itu, terkait maraknya isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) pada Pilkada serentak 2017 ini, Peneliti Pusat Studi Perdamaian dan Keamanan (PSKP) UGM, Zuly Qodir mengatakan, kelompok politik di luar partai sengaja mengangkat isu agama untuk mempengaruhi pemilih yang disebarkan melalui jejaring media sosial.

Tidak hanya itu, Zuly juga menyampaikan, mereka sengaja membangun isu-isu lain agar muncul rasa kebencian pada agama dan etnis tertentu. "Ada labeling dan diskriminasi pada kelompok tertentu. Bahkan berusaha membangun kembali ingatan sosial masyarakat lewat isu komunisme," katanya.

Meski demikian, isu SARA yang dimainkan kelompok politik swasta di luar partai itu ternyata tidak begitu berpengaruh pada pemilih. Namun Zuly tetap menyangkan fenomena tersebut. Jika isu SARA tidak ditanggulangi oleh pihak berwenang, maka

akan terus menjadi isu liar yang disebarkan dan menimbulkan kebencian pada agama dan etnis tertentu.

Menurutnya hal ini berpotensi memecah-belah masyarakat. Maka dari itu masyarakat diminta tidak terpengaruh dengan isu SARA yang dimainkan para elite politik dan kelompok politik swasta dalam pelaksanaan pilkada selanjutnya.

Zuly Qodir menilai pelaksanaan pilkada serentak 2017 merupakan arena pertarungan elite politik partai yang memiliki modal dari sisi ekonomi, politik, dan kekuasaan. Selain itu, muncul pula para broker politik untuk mempengaruhi pemilih.

"Ada kekuatan politik partikelir atau politik swasta yang dulu tidak terbaca dengan baik. Kelompok ini bisa kita sebut semacam geng-geng politik," paparnya.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Asia Flinders University, Priyambudi Sulistyanto menyampaikan adanya kekhawatiran terhadap politik keluarga atau dinasti politik dalam pilkada belum sepenuhnya terjadi. Meskipun da beberapa daerah seperti di Banten yang menurutnya perlu ada kajian mengenai fenomena tersebut. "Fenomena yang terjadi sekarang baru dari suami ke istri atau ke anak," ujarnya.

Red: ternan/rahadi

☐ Netral

☐ Biasa

Isu	Tindak Lanjut
Isu SARA	☐ Untuk Ditanggapi
	☐ Untuk Diketahui
	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,

Pt. Kepala

Sekretaris

Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005